

HAK BURUH YANG BERAKHIR HUBUNGAN KERJANYA KARENA
MENGUNDURKAN DIRI UNTUK MENUNTUT UPAH YANG
DITAHAN OLEH PERUSAHAAN
(Studi Kasus di CV. SSG Yogyakarta)

Intisari

Oleh:

Ernanto Arisandi¹ Ari Hernawan²

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan perusahaan menahan upah buruh dengan alasan buruh telah menyebabkan kerugian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui dan mengkaji langkah mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang menghentikan proses mediasi di tingkat tripartit dengan alasan menunggu proses pidana selesai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Cara pengumpulan data dalam penelitian normatif penulis menggunakan metode dokumentasi melalui studi kepustakaan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan data primer sebagai obyek dari penelitian tersebut. Cara pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara kepada responden dengan alat pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kebijakan perusahaan untuk menahan upah buruh dengan alasan buruh telah menyebabkan kerugian perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena upah menurut UUK merupakan hak paling essential dari seorang buruh sehingga pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi tepat pada waktunya. Kedua, langkah mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang menghentikan proses mediasi di tingkat tripartit dengan alasan menunggu proses pidana selesai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena menurut UU PPHI mediator wajib untuk menyelesaikan proses mediasi dan mengeluarkan risalah serta anjuran dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak mediator menerima berkas permohonan mediasi.

Kata Kunci: buruh, mediator, pengusaha, upah

¹ Jetis Daleman RT 03 Gllangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta (ernantoarisandi@yahoo.co.id)

² Dosen Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**LABORERS' RIGHTS WHICH OVER BECAUSE OF RESIGNATION
DEMAND THE WAGE RETAINED BY THE COMPANY
(Case Study at CV SSG Yogyakarta)**

Abstract

by:

Ernanto Arisandi¹ Ari Hernawan²

The purpose of this study to know and review the company's policy to withhold labor costs on the grounds that workers have caused losses of the company according to Act No. 13 of 2003 on Manpower as well as to know and examine the mediator steps of the Office of Manpower and Transmigration of Yogyakarta City which stopped the mediation process at the tripartite level on the grounds of waiting for criminal proceedings to be completed under Act No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement.

This study belongs to the category of normative and empirical research. Normative research is a study that lays law as a norm system building. The way of collecting data in normative research of writer use method of documentation through literature study. Empirical research is a research conducted directly in the community, this study uses primary data as the object of the study. The way of collecting data in this research method is to use interview method to respondent with interview guidance tool.

The result of the research shows that: firstly, company policy to withhold labor wage by reason of labor has caused company loss not according to Act No. 13 of 2003 concerning Manpower because wage according to Manpower Act is the most essential right of a worker so that its fulfillment can't be postponed and must filled just in time. Secondly, the mediator step from the Manpower and Transmigration Office of Yogyakarta City which stopped the mediation process at the tripartite level by reason of waiting for the criminal process to be completed is inconsistent with Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement because according to the settlement of industrial relations disputes Act the mediator is obliged to complete the mediation process and issue minutes and suggestions within a period of no more than 30 days from the time the mediator receives the mediation request file.

Keywords: laborers, mediators, employers, wages

¹ Jetis Daleman RT 03 Gllangharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta (ernantoarisandi@yahoo.co.id)

² Lecturer of Civil Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.